

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang tahun anggaran 2018 di susun di maksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2018 sehingga di harapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan anggaran. Laporan Keuangan yang di susun meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai transaksi dan posisi keuangan yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun 2018 .

Laporan keuangan tersebut di gunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang di tetapkan, melihat berapa belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, menilai kondisi keuangan yang terdiri dari aset, hutang dan ekuitas, menilai efektivitas dan efisiensi anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang selaku OPD dan membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang di tetapkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang di gunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang selaku OPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi bagaimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang selaku OPD mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang selaku OPD apakah mengalami kenaikan/penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang di lakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang dan pemanfaatan sumber daya ekonomi yang di percayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan di harapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan baik keputusan ekonomi, maupun sosial dengan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang di gunakan dalam pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan / Dasar hukum yang melandasi penyusunan laporan Keuangan tahun 2018 adalah seperangkat ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan fan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016.
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016.
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sisdur dan Akutansi Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.

1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang ini merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan mencakup informasi-informasi yang di haruskan dan di anjurkan untuk di ungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang di perlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Bab I merupakan, bab pendahuluan yang menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan dan sistematika penyusunan laporan keuangan.
- Bab II merupakan, bab yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan-hambatan yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan.
- Bab III penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca yang terdiri dari Pendapatan, Beban, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas
- Bab IV merupakan, bab penutup tentang kesimpulan-kesimpulan penting dari laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2018.

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Pada tahun anggaran 2018 ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang telah menerima SP2D sebesar Rp.108.623.850.282,- Dana ini lah yang digunakan untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Padang Panjang selama tahun anggaran 2018, Dana dari SP2D yang di belanjakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp. 108.623.850.282,- dimana terdapat Contra Post Gaji sebesar Rp. 50.501.275,- dan sisa UYHD sebesar Rp. 218.514.128,-

Realisasi belanja OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang selama tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 108.623.850.282,- atau 86,27 % dari anggaran Rp.125.915562.178,22,- Jumlah tersebut di alokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.

Realisasi Belanja Modal lebih tinggi di banding dengan belanja barang/jasa dan belanja pegawai. Untuk belanja pegawai dari anggaran Rp. 88.113.485.197,22,- terealisasi sebesar Rp.75.887.364.152,- atau 86,12%. Belanja barang dan jasa dari anggaran Rp. 28.536.659.808,- terealisasi Rp.23.986.422.319,- atau 84,05%. Sementara belanja modal dari anggaran Rp.9.265.417.173,- terealisasi sebesar Rp. 8.750.063.811,- atau 94,44%.

Realisasi Belanja tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/Turun	
	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)	(Rp)	%
Belanja Pegawai	75.887.364.152,-	73.657.903.324,-	2.229.460.828,-	3,03
Belanja Barang dan Jasa	23.986.422.319,-	16.475.463.991,-	7.510.958.328,-	45,59
Belanja Modal	8.750.063.811,-	19.318.685.501,80	(10.568.621.690,8)	54,7
Jumlah	108.623.850.282,-	109.452.052.816,80	(828.202.534,8)	0,76

Realisasi Belanja Pegawai setelah dikurangi CP dan pengembalian belanja tahun 2018 sebesar Rp. 75.887.364.152,- dan tahun 2017 sebesar Rp. 73.657.903.324,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.229.460.828,- atau 3,03%..

Realisasi Belanja Barang setelah dikurangi pengembalian belanja tahun 2018 sebesar Rp. 23.986.422.319,-dan tahun 2017 sebesar Rp. 16.475.463.991,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.510.958.328,- atau 45,59%. Antara lain disebabkan oleh lebih banyaknya kegiatan yang terlaksana selama tahun anggaran 2018 dan terlaksananya pembayaran utang kegiatan tahun 2017.

Realisasi Belanja Modal tahun 2018 sebesar Rp. 8.750.063.811,- dan tahun 2017 sebesar Rp. 19.318.685.501,80 yang mengalami penurunan drastis sebesar Rp. 10.568.621.690,8 atau 54,7% dengan rincian yaitu :

- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 1.073.793.900,-
- Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 5.565.071.398,-
- Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan	Rp. 596.099.299,-
- Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 1.515.099.214,-</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 8.750.063.811,-

Rincian dari Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut (dalam rupiah) :

- Belanja Modal Pengadaan papan nama instansi	2.850.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Meubelair	127.550.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur	5.480.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Komputer/Unit/Jaringan	293.956.600,-
- Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	124.314.300,-
- Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	166.555.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	95.725.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu di ruangan pejabat	66.750.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	92.188.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Bidang Studi IPA Dasar	2.350.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	96.075.000,-
Jumlah Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah Rp. 1.073.793.900,-	

Rincian dari Belanja Gedung dan bangunan sebagai berikut (dalam rupiah) :

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	55.000.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.478.091.398,-
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	15.740.000,-
- BelanjaModal Pengadaan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	16.240.000,-
Jumlah Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan adalah Rp.5.565.071.398,-	

Rincian dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan jaringan sebagai berikut (dalam rupiah) :

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/air Baku	574.563.299,-
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	2.350.000,-

- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon di atas tana 19.186.000,-
- Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan jaringan adalah Rp. 596.099.299,-**

Rincian dari Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagai berikut (dalam rupiah) :

- Belanja Modal Pengadaan Umum 16.747.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan 279.394.000,-
 - Belanja Modal Dana BOS 1.218.958.214,-
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya adalah Rp.1.515.099.214 ,-**

2.2 Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada tahun anggaran 2018 ini ada beberapa kegiatan yang realisasinya nol antara lain :

- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya
(Home Use) : Rp. 38.000.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat : Rp. 50.000.000,-
 - Belanja Modal Pengadaan Software
(keg.Peremajaan, Pemutakhiran Data, dan Penyusunan
Profil Pendidikan Kota Padang Panjang : Rp. 76.000.000,-
- Kegiatan- kegiatan tersebut sama sekali tidak terlaksana disebabkan :
1. Tidak adanya penyedia dengan kualifikasi sesuai kebutuhan
 2. Saat pelaksanaan kontrak, terjadi Force majeure (bencana kebakaran)

BAB III
RINCIAN DAN PENJELASAN DARI POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1 PENDAPATAN

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Kendaraan bermotor sebesar Rp.1.050.000,-, serta retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebesar Rp.41.008.000,-. Selain itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga juga memiliki lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 10.123.830.875,- yang terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp.2.636.992.800,-
2. Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp.7.444.780.075,-

3.2 BEBAN

3.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai selama tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 75.824.659.598,- yang terdiri dari :

URAIAN	JUMLAH
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	32.199.861.150,-
Tunjangan Keluarga – LO	3.048.097.008,-
Tunjangan Jabatan – LO	225.470.000,-
Tunjangan Fungsional – LO	2.831.171.154,-
Tunjangan Fungsional Umum – LO	189.890.000,-
Tunjangan Beras – LO	1.620.904.440,-
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	89.651.504,-
Pembulatan Gaji – LO	379.899,-
Tunjangan Profesi Guru PNSD – LO	18.112.802.635,-
Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LO	227.000.000,-
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	17.279.431.808,-
JUMLAH	75.824.659.598,-

Jumlah yang disajikan pada Beban Gaji merupakan realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 sebesar Rp. 40.268.129.709,- dan ditambah dengan Kekurangan Pembayaran Gaji Tahun Anggaran 2018 yang belum dibayarkan sebesar Rp.28.361.236,- serta dikurangi pembayaran kekurangan rapel gaji 2017 yang sudah dibayarkan yaitu sebesar 91.065.790,- sehingga menjadi Rp. 40.205.425.155,-.

Kekurangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan tersebut terdiri dari;

Uraian	Jumlah Belanja 2018	Kekurangan Rapel Gaji 2017 yang sudah dibayarkan	Rapel Gaji 2018 yang Belum Dibayar	Beban Gaji 2018
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	32.250.621.350	69.909.300	19.149.100	32.199.861.150
Tunjangan Keluarga-LO	3.053.422.750	6.488.120	1.958.998	3.048.893.628
Tunjangan Jabatan-LO	225.470.000	0	-	225.470.000
Tunjangan Fungsional - LO	2.843.390.154	14.036.000	1.817.000	2.831.171.154
Tunjangan Fungsional Umum- LO	184.597.000	142.000	5.435.000	189.890.000
Tunjangan Beras - LO	1.620.107.820	-	-	1.620.107.820
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LO	90.134.199	482.695	-	89.651.504
Pembulatan Gaji -LO	386.436	7.675	1.138	379.899
Jumlah	40.268.129.709	91.065.790	28.361.236	40.205.425.155

3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2018 terdiri dari :

No.	Uraian Beban	Jumlah (Rp)
1	Beban persediaan alat tulis kantor	819.027.700,-
2	Beban persediaan alat listrik dan elektronik	80.785.660,-
3	Beban persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	30.281.500,-
4	Beban persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	208.541.140,-
5	Beban persediaan bahan bakar minyak/gas dan pelumas	97.392.177,-
6	Beban persediaan barang cetakan	534.137.002,-
7	Beban persediaan hadiah	57.127.000,-
	Beban Persediaan Alat-alat Dapur	520.000,-
8	Beban persediaan bahan baku bangunan	287.835.779,-
9	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	9.225.000,-
10	Beban persediaan bahan obat-obatan	42.185.665,-
11	Beban persediaan bahan dan alat percontohan	91.295.000,-
13	Beban Persediaan Bahan dan Perlengkapan Olah Raga	41.317.000,-
14	Beban Persediaan Alat Praktek dan Perlengkapan Sekolah	210.259.450,-
	Beban Persediaan Buku Siswa	586.567.600,-
15	Beban jasa telepon	41.561.863,-
16	Beban jasa air	193.326.650,-

17	Beban jasa listrik	160.011.955,-
18	Beban jasa kawat/faksimili/internet	23.427.507,-
19	Beban jasa paket pengiriman	130.500,-
21	Beban jasa publikasi	26.030.000,-
22	Beban retribusi kebersihan	710.000,-
24	Beban kontribusi	760.950.000,-
26	Beban dekorasi	2.500.000,-
27	Beban jasa servis	32.346.359,-
28	Beban pajak kendaraan bermotor	5.823.500,-
29	Belanja penggandaan	194.748.000,-
30	Beban sewa gedung/kantor/tempat	759.613.000,-
31	Beban sewa sarana mobilitas darat	40.550.000,-
32	Beban sewa meja kursi	1.250.000,-
33	Beban sewa tenda	4.500.000,-
34	Beban sewa pakaian adat/ tradisional	32.500.000,-
35	Beban sewa sound system dan lighting	14.000.000,-
37	Beban makanan dan minuman rapat	735.254.675,-
38	Beban makanan dan minuman tamu	1.790.750,-
	Beban makanan dan minuman pelatihan	123.085.100,-
39	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	195.730.000,-
40	Beban pakaian batik tradisional	17.625.000,-
41	Beban pakaian olahraga	159.850.000,-
42	Beban belanja pakaian khusus	21.050.000,-
43	Beban bimbingan teknis	40.500.000,-
44	Beban Honorarium panitia pelaksana kegiatan	6.100.000,-
45	Beban Honorarium tim pengadaan barang dan jasa	14.450.000,-
46	Beban Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS	416.760.000,-
47	Beban Penggantian Transport PNS	36.027.100,-
48	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	784.855.000,-
49	Beban honorarium pegawai honorer/tidak tetap	117.168.119,-
50	Beban Jasa Non Pegawai	3.687.131.000,-
51	Beban Upah pegawai Harian	3.731.957.440,-
52	Beban honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS	1.500.000,-
53	Beban penggantian transport non PNS	269.091.200,-
54	Beban Pegawai Dana BOS	322.750.000,-
55	Beban Jasa BOS	3.486.508.726,-
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.878.000,-
56	Beban pemeliharaan BOS	174.419.317,-
57	Beban Pemeliharaan aset lainnya	7.260.000,-
58	Beban perjalanan dinas dalam daerah	360.879.304,-
59	Beban perjalanan dinas luar daerah	2.095.838.311,-
60	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	306.297.333,-
	Beban Perjalanan Dinas BOS	616.796.102,-
61	Beban hibah	320.975.000,-
62	Beban penyusutan dan amortisasi Aset Tetap	4.597.533.661,-
	Beban Penyusutan Aset lain-lain	34.695.656,-
63	Beban lain-lain	556.697.953,-
	JUMLAH	104.493.331.352,-

Dari angka-angka yang disajikan tersebut ada beberapa jenis beban yang bila disandingkan dengan LRA akan berbeda yaitu :

Beban Persediaan

Merupakan angka LRA yang dipengaruhi oleh persediaan tahun lalu dan persediaan tahun ini serta hutang 2018. Perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Beban	Persediaan Th Lalu	Belanja (LRA) 2018	Persediaan Akhir	Utang	Beban Th 2018
Persediaan Alat Tulis Kantor	80.269.825	829.654.173	90.896.298	0	819.027.700
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.005.150	226.206.530	34.670.540,-	0	208.541.140,
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.318.700	89.458.170	14.991.210	0	80.785.660,-
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	250.000	8.975.000	0	0	9.225.000,-
Persediaan Bahan Obat-obatan	2.597.315	41.279.250	1.690.900	0	42.185.665
Persediaan Perangko, Matrai dan benda pos lainnya	492.000	32.591.500	2.802.000	0	30.281.500,-
Persediaan Alat Peraga dan Percontohan	3.241.250	88.053.750	0	0	91.295.000,-
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	876.000	99.269.177	2.753.000	0	97.392.177,-
Persediaan Barang Cetak	4.475.000	535.387.002	5.725.000	0	534.137.002,-
Persediaan Alat Praktek dan Perlengkapan Sekolah	580.000	212.779.450	3.100.000	0	210.259.450,-

Beban Jasa Telepon, Air dan Listrik

Pada tahun 2018 Beban Jasa dipengaruhi oleh hutang tahun lalu yang tidak tercatat pada Neraca Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga karena keterlambatan pembayaran sehingga pada tanggal pelaporan nilai tagihan bulan Desember 2018 (Hutang Jasa th 2018) belum didapat dengan akurat. Dalam hal ini, dilakukan penyesuaian pada kertas kerja tentang hutang yang seharusnya dicatat dengan menambah hutang sebesar selisih pencatatan tahun lalu dengan yang seharusnya dan mengurangi ekuitas dengan jumlah yang sama.

Uraian	Jumlah Belanja 2018	Hutang Tahun ini (Beban +)	Hutang Tahun lalu (Beban -)	Beban Jasa 2018
Beban Jasa telepon	43.671.764	1.606.926	3.716.827	41.561.863
Beban Jasa air	194.217.600	3.036.800	3.927.750	193.326.650
Beban Jasa listrik	165.756.981	3.948.625	9.693.651	160.011.955
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	25.925.607	0	2.498.100	23.427507
Jumlah	429.571.952	8.592.351	19.836.328	418.327.975

Beban Penyusutan

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Tahun ini adalah sebesar Rp.4.597.522.661,- dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya adalah sebesar Rp.34.695.656,- (sesuai data yang di dapat dari bagian aset)

3.3 BELANJA

Belanja pada LRA disusun berdasarkan basis kas. Realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 108.623.850.282,- atau 86,27 % dari Anggaran Rp. 125.915.562.178,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.75.887.364.152,- dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 23.986.422.319,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 8.750.063.811,-

3.3.1. Belanja Pegawai

Merupakan jumlah belanja pegawai yang telah direalisasikan sebesar Rp75.887.364.152,- selama tahun anggaran 2018. Belanja Pegawai tersebut terdiri dari Komponen Gaji, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tunjangan Sertifikasi Guru dan Tunjangan Guru Non Sertifikasi.

Rincian dan Jumlah Belanja Pegawai adalah :

Uraian	Jumlah
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	32.250.621.350,-
Tunjangan Keluarga	3.052.626.130,-
Tunjangan Jabatan	225.470.000,-
Tunjangan Fungsional	2.843.390.154,-
Tunjangan Fungsional Umum	184.597.000,-
Tunjangan Beras	1.620.904.440,-
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	90.134.199,-
Pembulatan Gaji	386.436,-

Tunjangan Profesi Guru PNSD	18.112.802.635,-
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	227.000.000,-
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	17.279.431.808,-
Jumlah	75.887.364.152,-

Belanja Gaji dan Tunjangan terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan setiap bulan, Gaji bulan ke 13, Gaji bulan ke 14, Rapel Kekurangan Pembayaran Gaji, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tunjangan Kesejahteraan Lebaran dan Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi dan Tunjangan Guru Non Sertifikasi, yang dirinci per rekening belanja sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	88.113.485.197	75.887.364.152
Gaji dan Tunjangan	70.430.735.197	58.607.932.344
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	39.588.157.702	32.250.621.350
Tunjangan Keluarga	3.166.250.000	3.052.626.130
Tunjangan Jabatan	246.000.000	225.470.000
Tunjangan Fungsional	2.936.000.000	2.843.390.154
Tunjangan Fungsional Umum	190.000.000	184.597.000
Tunjangan Beras	1.670.000.000	1.620.904.440
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	95.297.500	90.134.199
Pembulatan Gaji	750.000	386.436
Tunjangan Profesi Guru PNSD	21.795.547.495	18.112.802.635
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	742.732.500	227.000.000
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	17.681.250.000	17.279.431.808
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17.681.250.000	17.279.431.808

Belanja Pegawai yang dipengaruhi oleh pengembalian Belanja adalah :

- Gaji dan Tunjangan Lainnya

Pada tahun 2018 terdapat Contra Post (CP) terhadap gaji dan pengembalian ke Kas Daerah karena adanya beberapa orang yang tidak lagi berhak mendapatkan tunjangan istri/suami dan tunjangan anak masih menerima tunjangan tersebut diakibatkan orang tersebut terlambat melaporkan ke Bendahara Gaji. Pengembalian juga disebabkan adanya keterlambatan dalam pengurusana SKPP Gaji bagi Pegawai yang akan pensiun, dimana gaji masih dibayarkan sementara harusnya pegawai yang bersangkutan sudah pensiun dan hal lain seperti

keterlanjuran pembayaran karena cuti atau mutasi jabatan sehingga yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan tersebut.

Pada Laporan Realisasi Anggaran, SP2D Gaji yang cair dicatat sebesar nilai SP2D dikurangi dengan Contra Post Gaji sesuai rekening keterlanjuran gaji yang dipotong, demikian juga halnya dengan realisasi yang merupakan pengurangan SP2D dengan Contra Post Gaji dan Pengembalian ke Kas Daerah sesuai dengan tabel berikut :

URAIAN	SP2D	CP Gaji	UYHD	REALISASI
Gaji dan Tunjangan	40.331.859.442	50.501.275	4.532.208	40.276.825.959
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	32.259.317.450	0	0	33.722.890.700
Tunjangan Keluarga	3.079.291.892	24.906.844	962.298	3.053.422.750
Tunjangan Jabatan	231.390.000	5.920.000	0	231.355.000
Tunjangan Fungsional	2.865.106.000	19.666.756	2.049.090	2.843.390.154
Tunjangan Fungsional Umum	184.597.000	0	0	181.100.000
Tunjangan Beras	1.621.628.640	0	1.520.820	1.620.107.820
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	90.134.199	0	0	90.134.199
Pembulatan Gaji	394.261	7.675	150	386.436

Pengembalian Gaji ke Kas Daerah sebesar Rp. dan Contra Post Gaji sebesar Rp.50.501.275 menyebabkan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai yang terealisasi menjadi Rp. 40.276.825.959,- yang menunjukkan bahwa persentase realisasi 84% dari anggaran Rp. 47.892.455.202,- .

- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya juga dipengaruhi oleh pengembalian atas keterlanjuran pembayaran yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, yang bersangkutan terlambat menginformasikan bahwa anak ybs tidak berhak lagi menerima tunjangan.

Jumlah Anggaran, Realisasi dan Pengembalian Tunjangan dapat dilihat pada tabel berikut ;

URAIAN	ANGGARAN	SP2D	REALISASI	UYHD
Tunjangan Profesi Guru PNSD	21.795.547.495	18.135.100.600	18.112.802.635	22.297.965
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	742.732.500	227.000.000	227.000.000	0
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17.681.250.000	17.279.431.808	17.279.431.808	0
Jumlah	36.880.309.220	35.641.532.408	35.619.234.443	22.297.965

Untuk Belanja Pegawai yang lainnya sesuai dengan SPJ yang diajukan Bendahara dan Pencairan Dana melalui SP2D UP/GU.

3.3.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk operasional kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga selama tahun anggaran 2018 yang berasal dari penerimaan SP2D dan dipengaruhi penyetoran kembali ke kas daerah. Belanja Barang dan Jasa dicatat berdasarkan basis kas yang terdiri dari :

Belanja alat tulis kantor	215.882.850
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	22.987.500
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	6.315.000
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20.203.000
Belanja Dekorasi	5.175.000
Belanja Hadiah	57.127.000
Belanja Pengadaan Alat-alat Dapur	520.000
Belanja Bahan/Material	477.718.329
Belanja Bahan Baku Bangunan	287.835.779
Belanja bahan Obat-obatan	16.137.800
Belanja bahan dan Alat Percontohan	88.053.750
Belanja Bahan dan Perlengkapan Olah Raga	85.691.000
Belanja Jasa Kantor	1.217.282.452
Belanja Telepon	43.671.764
Belanja Air	194.217.600
Belanja Listrik	165.756.981
Belanja Kawat/faksimili/internet/TV berlangganan	25.925.607
Belanja paket/pengiriman	130.500
Belanja Jasa Publikasi	26.030.000
Belanja Jasa Non Pegawai	3.687.131.000
Belanja Retribusi Kebersihan	600.000
Belanja kontribusi	760.950.000
Upah Pegawai Harian	3.803.332.440
Belanja jasa servis	32.346.359
Belanja bahan bakar/minyak/gas pelumas	99.269.177
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.823.500
Belanja Cetak	328.351.400
Belanja Penggandaan	197.635.500
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	766.613.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	40.550.000
Belanja sewa meja kursi	1.250.000
Belanja sewa tenda	4.500.000
Belanja sewa pakaian adat/tradisional	32.500.000
Belanja sewa sound system dan lighting	14.000.000
Belanja makanan dan Minuman Harian Pegawai	24.585.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	759.916.675
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.790.750
Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	133.568.100
Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.625.000
Belanja pakaian olah raga	159.850.000
Belanja Pakaian Upacara	195.730.000
Belanja pakaian Khusus	21.050.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	367.554.304
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	2.123.117.811

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	306.297.333
Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.325.000
Belanja Pemeliharaan Alat dan Perlengkapan Kantor	18.553.000
Belanja pemeliharaan website	6.600.000
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	6.275.859.420
Belanja Bimbingan Teknis	40.500.000
Belanja Uang diserahkan kepada masy/pihak ke3	402.975.000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS	449.910.000
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	800.715.000
Pengganti Transport Non PNS	275.391.200
Penggantian Transport PNS	53.727.100
JUMLAH	23.498.154.200

3.3.3 Belanja Modal

Merupakan belanja untuk pembelian barang-barang modal selama tahun 2018 yang di gunakan untuk keperluan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang. Belanja Modal tahun 2018 sebesar Rp. 8.750.063.811,- Pengadaan Belanja Modal di tahun ini yaitu :

- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 1.073.793.900,-
- Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 5.565.071.398,-
- Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan	Rp. 596.099.299,-
- Belanja Aset Tetap Lainnya	<u>Rp. 1.515.099.214,-</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp. 8.750.063.811,-

3.4 ASET

Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pada Tahun 2018 merupakan aset tahun lalu ditambah dengan pembelian tahun ini dan dikurangi pemakaian tahun ini bagi aset lancar. Nilai buku Aset Per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 86.367.002.326,14 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset lainnya.

3.4.1 Aset Lancar

- Kas

Pada akhir tahun 2018 terdapat kas Dana BOS pada Bendahara sekolah sebesar Rp.512.259.761,- yang merupakan belanja BOS tingkat SD dan SMP yang berada pada bendahara masing-masing sekolah dan kas bendahara tercatat Rp. 25.372.832,- yang merupakan sisa pajak yang belum di setor, akan tetapi sisa pajak itu sudah disetor Bendahara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tanggal 18 Februari 2019.

- Persediaan

Persediaan merupakan aset dalam bentuk barang / perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Semua jenis persediaan pada

tanggal Neraca berada dalam kondisi baik dan nilai yang dicatat sesuai dengan harga perolehan terakhir.

Persediaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga pada tanggal 31 Desember 2018 terdiri dari:

Persediaan Alat Tulis Kantor	90.896.298,-
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	14.991.210,-
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	34.670.540,-
Persediaan Bahan Obat-obatan	1.690.900,-
Persediaan Perangko/Materai	2.802.000,-
Persediaan Bahan Bakar Minyak	2.753.000,-
Persediaan Barang Cetak	5.725.000,-
Alat Praktek dan Perlengkapan Sekolah	3.100.000,-
JUMLAH	156.628.948,-

3.4.2 Aset Tetap

Aset Tetap Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Pada Tahun 2018 merupakan aset tahun lalu ditambah dengan pembelian tahun ini dan Pembelian dari Dana BOS. Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2018 Rp.86.367.002.328,14 yang merupakan aset berwujud dan masa manfaatnya lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan operasional.

Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	47.859.260.150,00
Peralatan dan Mesin	27.427.280.548,00
Gedung dan Bangunan	100.934.611.554,80
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.730.092.594,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	8.312.547.284,00
Aset Tetap Lainnya	8.073.204.507,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(44.622.545.735,65)
JUMLAH	149.714.450.902,15

3.4.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya di tahun 2018 berjumlah Rp.1.333.315.961,- dan tahun 2017 berjumlah Rp. 4.346.988.911,-

3.5. KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan klaim pihak lain yang harus dibayar akibat transaksi masa lalu. Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terdapat Kekurangan Gaji yang belum dibayarkan dan beberapa jenis belanja jasa yang belum dibayarkan.

Hutang yang belum dibayar pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.66.837.448,- yang terdiri dari hutang Perhitungan Pihak ketiga sebesar Rp.29.773.861,- Kekurangan Gaji tahun 2018 sebesar Rp. 28.361.236,-, hutang belanja jasa (Listrik, Air, Telepon, Internet) serta retribusi sampah sebesar Rp.8.702.351,- dengan rincian terlampir.

3.6 EKUITAS DANA

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Nilai Ekuitas tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 50.910.966.308,15,-** dan tahun sebelumnya adalah sebesar **Rp. 48.474.460.634,32**

Hal-hal yang mempengaruhi didapatnya ekuitas akhir sebesar **Rp.50.910.966.308,15,-** adalah Dampak kebijakan Akumulasi Penyusutan aset tetap sebesar Rp.1.421.425.271,55, Dampak kebijakan Akumulasi Penyusutan aset lainnya sebesar Rp.2.892.643.958,-, koreksi aset tetap sebesar Rp.1.364.565.454,42. Koreksi Hutang sebesar Rp.35.407.454. koreksi kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.6.488.488,- yang merupakan koreksi tambah atas kekurangan pencatatan saldo awal kas dana BOS SDN 12 Silaing Bawah.

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual pada Pemda

Beberapa POS pada Laporan Keuangan yang dipengaruhi penerapan basis akrual yaitu :

- Persediaan dan Beban Persediaan

Merupakan jumlah belanja dengan basis kas yang dipengaruhi oleh persediaan tahun lalu dan persediaan tahun ini. Perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Beban	Persediaan Th Lalu	Belanja (LRA) 2018	Persediaan Akhir	Utang	Beban Th 2018
Persediaan Alat Tulis Kantor	80.269.825	829.654.173	90.896.298	0	819.027.700
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.005.150	226.206.530	34.670.540,-	0	208.541.140,
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	6.318.700	89.458.170	14.991.210	0	80.785.660,-
Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	250.000	8.975.000	0	0	9.225.000,-
Persediaan Bahan Obat-obatan	2.597.315	41.279.250	1.690.900	0	42.185.665
Persediaan Perangko, Matrai dan benda pos lainnya	492.000	32.591.500	2.802.000	0	30.281.500,-

Persediaan Alat Peraga dan Percontohan	3.241.250	88.053.750	0	0	91.295.000,-
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	876.000	99.269.177	2.753.000	0	97.392.177,-
Persediaan Barang Cetak	4.475.000	535.387.002	5.725.000	0	534.137.002,-
Persediaan Alat Praktek dan Perlengkapan Sekolah	580.000	212.779.450	3.100.000	0	210.259.450,-

- Membuat jurnal balik atas persediaan awal dengan menambah beban persediaan (D) dan mengurangi persediaan (K) sebesar persediaan awal
- Mencatat Belanja Tahun 2018 sebagai Beban Persediaan
- Menginventarisir Persediaan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2018 dengan mengkredit Beban Persediaan sebesar Persediaan yang tersisa.

- **Beban Gaji dan Tunjangan**

Jumlah yang disajikan merupakan realisasi Belanja Pegawai tahun 2018 sebesar Rp. 75.887.364.152,- dan ditambah dengan Kekurangan Pembayaran Gaji Tahun Anggaran 2018 yang belum dibayarkan sebesar Rp.28.361.236,- serta dikurangi pembayaran kekurangan rapel gaji 2017 yang sudah dibayarkan yaitu sebesar 91.065.790,- yang menambah beban sehingga beban pegawai menjadi Rp.75.824.659.598,-

- **Hutang**

Merupakan Hutang Kekurangan Gaji tahun 2018 dicatat dengan menambah hutang dan beban sebesar Rp. 28.361.236,- dan ditambah hutang jangka pendek lainnya seperti Telepon, Air, Listrik dan Internet Rp. 8.702.351,-

- **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.597.522.661 dan Beban Penyusutan dan Amortirisasi Aset lainnya sebesar Rp.34.695.656,- dan menambah Akumulasi Penyusutan. (sesuai data yang di dapat dari bagian aset)

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah di bidang Pendidikan.

Untuk melaksanakan tugas wajib tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Perwako Padang Panjang No 32 tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu di bidang pendidikan, Pemuda dan olah Raga.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan kurikulum dan kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
4. Bidang Kebudayaan, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
5. Bidang Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Rekreasi, Pembinaan Olah Raga Pendidikan serta kepemudaan dan kepramukaan.
6. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana TK dan SD, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan sarana dan prasarana Pemuda, Olah Raga dan kebudayaan.

BAB V

PENUTUP

Terwujudnya penyusunan Laporan Keuangan Tahun anggaran 2018 ini merupakan kumpulan dari transaksi yang terjadi selama tahun anggaran 2018 pada OPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga baik Transaksi Kas maupun Non Kas yang berpengaruh pada Laporan Operasional, Neraca dan Perubahan Ekuitas yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2013.

Laporan ini dibuat setiap tahun dengan harapan bisa melihat pencapaian target kinerja, mengetahui besarnya dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional dan mengetahui posisi keuangan OPD menurut keadaan yang sesungguhnya untuk dapat melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga
Kota Padang Panjang

dto.

Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199003 1 004